

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Hafiz Tanjung, “*Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*”, Yogyakarta: BPFE UGM, 2000.
- Abdul Halim, “*Manajemen Keuangan Daerah*”, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Abdul Halim, “*Akuntansi Keuangan Daerah*”, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- A.G. Subarsono, “*Analisa Kebijakan Publik*”, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005.
- Amirudin dan H.Zainal, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. Rja Grfindo Persada, Jakarta 2003.
- Ardianto, Elvinarodkk., “*Komunikasi Massa*”, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- Azhary, “*Negara Hukum Indonesia*”, Jakarta: UI Press, 1995.
- Bagir Manan, “*Dasar-DasarPerundang-undangan Indonesia*”, Penerbit IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.
- Henry Campbell Black, “*Black’s Law Dictionary*”, West Publishing, 1990.
- Howlett, Michael, dan M. Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Indra Bastian, “*Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*”, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, “*PerihalUndang-Undang*”, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- M. Marsono, “*Tata Usaha Perbendaharaan RI*”, Jakarta: PT. Saptadarma, 1958.

Mahmudi, *“Manajemen Kinerja Sektor Publik”*, Edisi Kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

Mardiasmo, *“Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)”*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

P.Loina Lalolo Krina, *“Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transaparansi, dan Partisipasi”*, Jakarta, 2006.

Rahardjo Adisasmita, *“Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah”*, PT.Graha Ilmu Makasar 2010.

Riant Nugroho, *“Public Policy”*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.

Ronny Hanitijo Sumitro, *“Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Sri Suwitri, *“Konsep Dasar Kebijakan Publik”*, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *“Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah”*, cahaya Arma Pustaka, 2014.

William N. Dunn, *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

Yuwonodkk., *“Psikologi Industri dan Organisasi”*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2005.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  
dan Pemerintah Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UU nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Konferensi  
Tingkat Tinggi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian-African  
Strategic Partnership*.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  
Daerah.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim  
Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan  
Republik Indonesia.

Perda Kota Bandung No. 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

Keputusan Walikota Nomor 080/Kep.184-Pem.Um/2015 Tentang Panitia  
Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam

Peringatan Ke-60 Tahun Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian African Strategic Partnership* Tingkat Kota Bandung. Diterbitkan dan ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2015.

Keputusan Walikota Nomor 027/Kep.227-Bag.KS/2015 Tentang Penetapan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Prasarana dan Sarana Pendukung Termasuk Infrastruktur Kota Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Tahun Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian African Strategic Partnership* di Kota Bandung Melalui Mekanisme Penunjukan Langsung. Diterbitkan dan ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2015.

Keputusan Walikota Nomor 080/Kep.364-DisKop-UKM-InDag/2015 Tentang Panitia Pelaksanaan Pameran *Bandung Art And Craft Expo* 2015 dalam Rangka Peringatan Konferensi Asia Afrika Ke-60 pada Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri. Diterbitkan dan ditetapkan pada tanggal 17 April 2015.

### **Jurnal dan Karya-Karya Ilmiah**

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun Waktu PELITA I - PELITA IV*, Disertasi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.

Abdul Latief, "*Penegakan Hukum Administrasi Pemerintahan dan Tindak Pidana Korupsi*", Orasi ilmiah Kampus UMI, Makassar, 2015.

- Addina Marizka, “*Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*”, Skripsi, Medan: USU, 2010.
- Ellwood, Sheila, *Parish and Town Council: Financial Accountability and Management, Local Government Studies*, Vol 19, pp. 368-386.
- Mohammad Adhim, “*Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya Dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sarolangun*”, Thesis S2 Universitas Jambi, 2008.
- Moh. Fadli, “*Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia*”, Disertasi tidak diterbitkan, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011.
- Philipus M. Hadjon, “*Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*”, Paper disampaikan pada Seminar Nasional “*Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*”, Semarang, 2004.
- Tabloid Diplomasi, “*Konferensi Asia Afrika Sebagai Tonggak Sejarah*”, No. 87, Tahun VIII, Kementrian Luar Negeri Indonesia, 2015.

### **Referensi Online**

- Aktual Post, “*Daftar lengkap susunan acara KAA 2015 di Jakarta dan Bandung*”, Berita Online, <http://www.aktualpost.com/2015/04/daftar-lengkap-susunan-acara-konferensi-asia-afrika-kaa-2015-di-jakarta-bandung/>, diakses tanggal 7 Maret 2016.

Detik Finance, “*APBD Terlambat Cair, Ini Cara Ridwan Kamil Sukseskan KAA Dengan Dana Seadanya*”, *Media Online*, [http://finance.detik.com/read/2015/04/24/161030/2897493/4/apbd\\_terlambat-cair-ini-cara-ridwan-kamil-sukseskan-kaa-dengan-dana-seadanya](http://finance.detik.com/read/2015/04/24/161030/2897493/4/apbd_terlambat-cair-ini-cara-ridwan-kamil-sukseskan-kaa-dengan-dana-seadanya), diakses tanggal 12 Maret 2016.

Rmol Jabar, “*Pemkot Bandung Gunakan Anggaran Biasa Untuk Persiapan Infrastruktur KAA*”, *Media Online*, <http://www.rmoljabar.com/read/2015/03/02/6913/Pemkot-Bandung-Gunakan-Anggaran-Biasa-untuk-Persiapan-Infrastruktur-KAA->, diakses tanggal 12 Maret 2016.

SBN News, “*Proyek KAA Telan Dana Besar, Kinerja Pemkot Bandung Diuji*”, *Berita Online*, <http://www.sbn-news.com/proyek-kaa-telan-dana-besar-kinerja-pemkot-bandung-diuji/>, diakses tanggal 12 Maret 2016.

Tempo.Co, “*KAA Mepet, Ridwan Kamil Gunakan 10 Kontraktor Benahi Bandung*”, *Media Online*, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/27/058653472/kaa-mepet-ridwan-kamil-pakai-10-kontraktor-benahi-bandung>, diakses tanggal 12 Maret 2016.